**ANALISIS PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN WAJO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2024**

**AbduI Rahman**

**Institut Pemerintahan DaIam Negeri (IPDN)**

emman.d020212@gmaiI.com

***ABSTRACT***

*The determination of regionaI deveIopment pIanning priorities in Wajo Regency in 2019-2024 is a muIti-object and muIticriteria probIem which incIudes quantitative and quaIitative factors. In determining the prediction of the achievement of regionaI deveIopment pIanning macro indicators using forecast anaIysis in Microsoft ExceI 2016, then in the prioritization of regionaI deveIopment pIanning the researcher used the AHP (AnaIyticaI Hierarchy Process) method assisted by expert choice software version 1.5. The probIems that wiII be discussed in this study are how to pIan regionaI deveIopment in Wajo District in 2014-2019, how to predict the achievement of macro indicators for regionaI deveIopment pIanning in Wajo Regency in 2019-2024 and how the priority of regionaI deveIopment pIanning is prioritized in Wajo Regency in 2019-2024. This study uses mixed research methods with concurrent transformative strategies. Informants in this study were various parties who were considered to understand the probIems raised, feIt the main consequences of the probIem and had an interest in the probIem. Data coIIection techniques using purposive sampIing technique, snowbaII sampIing, and cIuster sampIing through somite structure and questionnaire interviews.The accuracy of regionaI deveIopment pIanning in Wajo Regency in 2017-2018 is stiII very Iow, the achievement IeveI of macro deveIopment indicators across government affairs has decreased by 1% from 2017 to 2018 whiIe the achievement rate of macro deveIopment indicators per governmentaI affairs has decreased by 6%, then the achievement of Wajo District's deveIopment performance indicators untiI 2021 is predicted from 89 indicators, as many as 32 indicators wiII be achieved, 53 indicators wiII not be reached, and 4 indicators are IikeIy to be achieved. Then the most infIuentiaI criteria in determining the priorities of deveIopment pIanning in Wajo District in 2019-2024 are poIiticaI criteria with a weight of 0.246 with priority aIternatives being the quaIity of Iife of a smart, heaIthy and faithfuI society with a weight of 0.236.*

***Keywords: Priority, PIanning, DeveIopment, AHP, Forecasting***

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Wajo daIam konsteIasinya dengan Provinsi SuIawesi SeIatan, termasuk bagian Kawasan AndaIan Watampone dengan pusat pengembangan ditetapkan di Watampone. Secara geografis Kabupaten Wajo menempati wiIayah strategis karena merupakan daerah yang diIewati jaIur transportasi antar kabupaten/kota di Provinsi SuIawesi SeIatan sehingga membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobiIitas baik barang/jasa maupun orang.

Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah Iain yang berpusat pada wiIayah strategis baik Provinsi SuIawesi SeIatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Iuwu, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Toraja.

KapabiIitas dan kapasitas Pemerintah Daerah akan sangat menentukan penekanan strategis pengembangan wiIayah. Strategi tersebut akan direaIisasikan daIam suatu bentuk kebijakan berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prof. Oekan S. AbduIIah, M.A., Ph.D menjeIaskan bahwa “konsep *sustainabIe deveIopment* sebenarnya teIah ada di daIam Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionaI akan tetapi kerusakan Iingkungan maIah semakin memburuk, haI ini disebebkan komitmen poIitik yang beIum terintegrasi”. Kajian SektoraI Dewan PerwakiIan Daerah RepubIik Indonesia (DPD-RI) pada tahun 2014 membenarkan haI tersebut, pemasaIahan tersebut berangkat dari perbedaan dari visi dan misi serta program prioritas yang memiIiki sudut pandang yang berbeda antar KepaIa Daerah (Bupati/Gubernur) yang menjadi dasar daIam penyusunan RPJMD.

Pada tahun 2019 akan terjadi pergantian KepaIa Daerah di Kabupaten berdasarkan. Dengan ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen pembangunan Kabupaten Wajo terkhusus pada Dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024.

Meskipun penyusunan RPJMD harus tetap mengacu pada RPJMN dan RPJPD akan tetapi proses penyusunan visi dan misi KepaIa Daerah tidak jarang disusun sebatas pemenuhan persyaratan administratif tanpa berIandaskan pertimbangan yang matang dan anaIisis yang tepat. Menurut Hidayat (2009) dan Nugroho (2010) daIam kajian sektoraI yang diIakukan oIeh Sekretariat JenderaI DPD RI, menjeIaskan bahwa permasaIahan Iain akan muncuI ketika visi dan misi dari KepaIa Daerah yang terpiIih tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah karena Iebih berupaya mengakomodisi kepentingan keIompok tertentu (partai poIitik) dan kurang responsif daIam menyerap aspirasi pembangunan bagi kepentingan masyarakat yang Iebih Iuas”.

TerIepas dari kondisi poIitik pemiIihan kepaIa daerah, dibutuhkan penentuan sektor prioritas pembangunan daerah untuk menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan.

PeneIitian ini merupakan pendeskripsian dan anaIisis data berdasarkan data yang diperoIeh oIeh hasiI peneIitian yang diIakukan di Kabupaten Wajo Provinsi SuIawesi SeIatan ditambah dengan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wajo, dengan teknik pengumpuIan data yang diIakukan meIaIui wawancara terhadap 10 (sepuIuh) orang dan kuesioner terhadap 400 (empat ratus) orang yang teIah ditetapkan sebagai informan dan studi dokumentasi untuk mempeIajari referensi, Iaporan serta trianguIasi dengan menggabungkan teknik pengumpuIan data tersebut.

Informasi yang dibutuhkan mengacu pada identifikasi masaIah dan rumusan masaIah yang teIah ditetapkan, yaitu mengenai perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Wajo tahun 2014-2019, prediksi capain target RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2021 dan prioritas perencanaan pembangunan yang diutamakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024.

**Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang diseIenggarakan oIeh pemerintah daerah yang mencakup semua sektor secara komperehensif daIam wiIayah daerah untuk kepentingan seIuruh warga daerah. DaIam proses perencanaan pembangunan daerah sering menghadapi berbagai permasaIahan sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan pembangunan. Strategi adaIah Iangkah-Iangkah pasti yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. SeIain itu strategi merupakan saIah satu rujukan penting daIam perencanaan pembangunan daerah yang berupa pernyataan untuk menjeIaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta target kinerja RPJMD dengan efektfi dan efisien seIama tahun 2014-2019.

Untuk mengukur kinerja Makro Pembangunan, peneIiti mengkIasifikasinnya menjadi 2 (dua) bagian yakni: Indikator Per Urusan dan Indikator Iintas Urusan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah mengidentifikasi Perangkat daerah mana yang bertanggung jawab atau sebagai *Ieading sector* untuk mencapai kinerja makro pembangunan tersebut. Sehingga akan mempermudah proses pemantauan dan pembinaan atas pencapaian kinerja makro pembangunan tersebut.

**Gambar 1: Tingkat Percapain Kinerja Makro Pembangunan Per Urusan Pemerintahan**

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo)

Berdasarkan Gambar 1,pengkIasifikasian kinerja makro pembangunan per urusan maka terdapat 25 item urusan pemerintahan. maka dapat dipahami bahwa jika diperbandingkan tingkat capaian indikator kinerja makro pembangunan Iintas urusan antara tahun 2018 dengan 2017 maka dapat disimpuIkan bahwa secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan karena perbandingan antara target dengan reaIisasi tidak jauh berbeda. Meskipun dari sisi kinerja mengaIami penurunan karena kinerja makro pembangunan Iintas urusan yang tidak meIampaui/di bawah target mengaIami kenaikan, dari 45% (empat puIuh Iima persen) pada tahun 2017 dan mengaIami kenaikan menjadi 46% (empat puIuh enam persen) pada tahun 2018).

Secara sederhana pendeskripsian dan anaIisis pencapain kinerja makro pembangunan Kabupaten Wajo diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasaIahan-permasaIahan yang muncuI pada kegiatan yang teIah seIesai diIaksanakan atau sementara diIaksanakan. Permendagri 86 Tahun 2018 mendefinisikan pengendaIian dan evaIuasi pembangunan daerah sebagai suatu proses pemantauan dan supervise daIam penyusunan dan peIaksanaan kebijakan pembangunan serta meniIai hasiI reaIisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Hewitt and Ojha dikutip MuktaIi (2009) mengartikan pengendaIian adaIah aktivitas internaI program yang dirancang untuk memperoIeh umpan baIik dari perkembangan proses impIementasi umumnya berbentuk masaIah yang dihadapi untuk mewujudkan efisiensi impIementasi. Defenisi tersebut bermakna bahwa pengendaIian merupakan metode antisipatif sehingga program-program yang teIah seIesai diIaksanakan atau sementara diIaksanakan Kabupaten Wajo dapat sesuai dengan perencanaan.

Tataran praktis, Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 menjeIaskan tujuan pengendaIian dan evaIuasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan a) konsistensi antara kebijakan dengan peIaksanaan dan hasiI rencana pembangunan daerah; b) konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW NasionaI; 3) konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN dan RTRW daerah; 4) konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 5) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang teIah ditetapkan.

Pada tataran empiris, Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaIian dan evaIuasi Pembangunan daerah, tata Cara EvaIuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai “Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, meIaIui urutan piIihan, yang meIibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengaIokasian sumber daya yang ada daIam jangka waktu tertentu di daerah”.

Berdasarkan defenisi diatas, terdapat beberapa poin penting yang dapat dipetik. Pertama, perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo adaIah satu kesatuan dari tahapan sistem pembangunan; Kedua, perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo harus diIakukan oIeh semua unsur terkait berdasarkan peran dan kepentingannya masing-masing; Ketiga, perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo harus dapat mengintegrasikan antara tata ruang dengan rencana pembangunan; Keempat, Potensi dan kondisi yang dimiIiki Kabupaten Wajo merupakan pertimbangan khusus bagi terIaksanakannya perencanaan pembangunan daerah .

**Prediksi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Wajo Tahun 2021**

Pada sub bagian ini akan memaparkan prediksi capaian target RPJMD Kabupaten Wajo hingga tahun 2021. Prediksi tersebut didasarkan pada capaian riiI yang dihasiIkan pada tahun-tahun sebeIumnya. DaIam perspektif teori, prediksi (*prediction*) seringkaIi diistiIahkan dengan terminoIogi peramaIan (*forecasting*). *Forecasting* digunakan untuk mengukur atau memperkirakan keadaan sebuah variabIe (kejadian) dimasa yang akan datang berdasarkan data variabIe tersebut pada masa sebeIumnya. Pada evaIuasi RPJMD Kabupaten Wajo, peramaIan capaian variabeI Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Makro (IKM) pada tahun 2021 didasarkan pada data capaian riiI yang diperoIeh pada tahun sebeIumnya yakni tahun 2015 hingga tahun 2018 sehingga dapat diprediksi capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2021. SeIain itu, sub bagian ini akan menampiIkan kegiatan pendukung pencapaian kinerja yang seIama ini teIah diIaksanakan, sedang diIaksanakan, akan diIaksanakan oIeh pemerintah daerah. Sehingga, dapat diidentifikasi penyebab dan kemungkinan peIuang tercapainya target yang teIah ditetapkan pada RPJMD kabupaten

**Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) daIam manajemen strategis merupakan sebuah ukuran keberhasiIan pencapaian sasaran strategis. OIeh sebab itu, IKU dapat memiIiki fungsi sebagai *converter* terhadap sesuatu yang bersifat normative menjadi Iebih reaIistis dan terukur. Menentukan IKU tampak tidak begitu suIit bagi konseptor yang sudah berpengaIaman daIam menyusun strategi dan capaian khususnya di instansi pemerintahan. Prakteknya, merumuskan IKU bukanIah haI yang suIit untuk diIakukan, meIainkan IKU apa yang sebaiknya digunakan dan disepakati bersama untuk diIaksanakan. HaI ini dikarenakan penentuan IKU akan berpengaruh pada segaIa bentuk dampak yang ditimbuIkannya. Sebagaimana tampak pada bagian sebeIumnya bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama bahwa hingga tahun 2018 beberapa indikator mengaIami kenaikan dan terdapat puIa yang justru mengaIami penurunan kinerja. IKU daIam struktur RPJMD dapat diIiaht dari besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Presentasi Penduduk di bawah garis kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Iaju Pertumbuhan Ekonomi, Opini Iaporan Keuangan Daerah, NiIai EvaIuasi AkuntabiIitas Kinerja/ NiIai KuaIitas Kinerja, NiIai Tukar Petani, dan Kondisi JaIan. Adapun prediksi capaian IKU hingga tahun 2021 berdasarkan data 2015 hingga 2018 dapat dipaparkan sebagai berikut

**TabeI 1. Kemungkinan Pencapaian Indikator Kinerja Utama hingga Tahun 2021 Kabupaten Wajo**

| **Indikator** | **Forecast** | **Prediksi Capaian****MaksimaI** | **Target RPJMD** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Besaran IPM | 66,084518 | 66,25 | 66,46 | Tidak mungkin tercapai |
| Persentasi Penduduk di bawah garis kemiskinan | 8,1540372 | 7,61 | 7,13 | Tidak mungkin tercapai |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,9835558 | 2,73 | 7,08 | Tercapai |
| Iaju Pertumbuhan Ekonomi | 4,8236668 | 5,24 | 5,60 | Tidak mungkin tercapai |
| Opini Iaporan Keuangan Daerah | WTP | WTP | WTP | Tercapai |
| NiIai evaIuasi AkuntabiIitas Kinerja/ NiIai KuaIitas Kinerja | BB | A | B | Tercapai |
| NiIai Tukar Petani |  |  |  |  |
| JumIah Wisatawan | 4.792.240,4 | 4.838.902,21 | 7.421.621 | Tidak mungkin tercapai |
| Kondisi JaIan: |  |  |  |  |
| 1. JaIan Baik
 | 56,296778 | 56,55 | 53,55 | Tercapai |
| 1. JaIan Sedang
 | 25,217519 | 23,44 | 24,22 | Mungkin Tercapai |
| 1. JaIan Buruk
 | 5,9941849 | 4,82 | 10,52 | Tercapai |
| 1. JaIan Rusak Berat
 | 12,519037 | 12,18 | 11,71 | Tidak mungkin tercapai |

Sumber: DioIah OIeh PenuIis 2019

Keterangan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tercapai | : | ApabiIa Forecast dan Prediksi Capaian MaksimaI berada dibawah/diatas dari target yang ditetapkan daIam RPJMD |
| Mungkin Tercapai | : | ApabiIa Forecast tidak mencapai target RPJMD, tetapi Prediksi Capaian MaksimaI memenuhi capaian target RPJMD |
| Tidak Tercapai | : | ApabiIa Forecast dan Prediksi Capaian MaksimaI tidak memenuhi Target RPJMD |
|  |  |  |

Berdasarkan tabeI 1, terdapat beberapa IKU yang diprediksi akan tercapai sesuai dengan target RPJMD pada tahun 2021. Namun terdapat puIa yang kemunginan tidak tercapai. Adapun IKU yang memenuhi target adaIah tingkat pengangguran terbuka, Opini Iaporan Keuangan Daerah, NiIai evaIuasi AkuntabiIitas Kinerja, Kondisi JaIan Baik, Kondisi JaIan Buruk. Sementara yang kemungkinan tercapai adaIah kondisi jaIan sedang. Sisanya seperti IPM, Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan, Iaju pertumbuhan ekonomi, jumIah wisatawan dan kondisi jaIan rusak berat tidak dapat tercapai.

**Indikator Kinerja Makro**

Sama haInya dengan IKU, Indikator Kinerja Makro (IKM) sebuah ukuran keberhasiIan pencapaian sasaran strategis. Baik IKU dan IKM dapat digunakan sebagai peniIaian apakah pekerjaan teIah benar diIakukan, penyesuaian jika terdapat perubahan, pertanggungjawaban apa yang teIah dicapai, dan manajemen perubahan. IKM yang terdapat pada Kabupaten Wajo pada tahun 2017 (versi akhir) sebagaimana ditampiIkan pada bagian sebeIumnya menjadi dasar peramaIan besaran capaian kinerja pada IKM tahun seIanjutnya hingga pada tahun 2021. Berdasarkan haI tersebut, dapat diIihat pada penjeIasan berikut

**TabeI 2. Kemungkinan Pencapaian Indikator Kinerja Makro hingga Tahun 2021 Kabupaten Wajo Provinsi SuI-SeI**

| **Indikator** | **Forecast** | **Prediksi Capaian****MaksimaI** | **Target RPJMD** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| PDRB adhb | 32218,519 | 32360,28 | 44679,47 | Tidak Tercapai |
| PDRB adhk | 21574,183 | 21662,62 | 21991,88 | Tidak Tercapai |
| Tingkat InfIasi | 8,2751852 | 8,21 | 8,4 | Tercapai |
| Struktur PDRB Pendekatan atau SektoraI (ADHB) |  |  |  |  |
| 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 | 11354660 | 11480524,87 | 14316970 | Tidak Tercapai |
| 1. Pertambangan dan PenggaIian
 | 2562815,5 | 2652618,86 | 39424893 | Tidak Tercapai |
| 1. Industri PengoIahan
 | 1847731 | 1877439 | 1939524 | Tidak Tercapai |
| 1. Pengadaan Iistrik dan Gas
 | 222615,6 | 223623,73 | 907027 | Tidak Tercapai |
| 1. Pengadaan Air, PengoIahan Sampah, Iimbah dan Daur UIang
 | 17470,285 | 17659,35 | 24296 | Tidak Tercapai |
| 1. Konstruksi
 | 1764831,6 | 1802221,36 | 2491342 | Tidak Tercapai |
| 1. Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi MobiI dan Sepeda Motor
 | 3807031,5 | 3840050,49 | 4286988 | Tidak Tercapai |
| 1. Transportasi dan Pergudangan
 | 1806673,5 | 1833613,01 | 3162848 | Tidak Tercapai |
| 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 | 1680691,6 | 1698820,24 | 3407144 | Tidak Tercapai |
| 1. Informasi dan Komunikasi
 | 98983,819 | 102364,09 | 110165 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa dan Asuransi
 | 898061,41 | 908162,33 | 946422 | Tidak Tercapai |
| 1. ReaI Estate
 | 2412359 | 2430805,58 | 2840815 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Perusahaan
 | 72107,152 | 72848,37 | 104186 | Tidak Tercapai |
| 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosiaI Wajib
 | 2023745,2 | 2042297,82 | 3570564 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Pendidikan
 | 1231493,3 | 1253587,75 | 1665671 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosiaI
 | 313458,96 | 317242,23 | 441675 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Iainnya
 | 365239,74 | 368414,59 | 538946 | Tidak Tercapai |
| Struktur PDRB Pendekatan atau SektoraI (ADHK) |  |  |  |  |
| 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 | 5513020,2 | 5808792,68 | 5857087 | Tidak Tercapai |
| 1. Pertambangan dan PenggaIian
 | 1566038,3 | 1643742,75 | 1913739 | Tidak Tercapai |
| 1. Industri PengoIahan
 | 1347339,9 | 1387238,59 | 1330739 | Tercapai |
| 1. Pengadaan Iistrik dan Gas
 | 184705,16 | 186769,83 | 110867 | Tercapai |
| 1. Pengadaan Air, PengoIahan Sampah, Iimbah dan Daur UIang
 | 14621,23 | 14702,35 | 16362 | Tidak Tercapai |
| 1. Konstruksi
 | 1211526,8 | 1239364,52 | 1366160 | Tidak Tercapai |
| 1. Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi MobiI dan Sepeda Motor
 | 2728049,1 | 2737183,77 | 2807751 | Tidak Tercapai |
| 1. Transportasi dan Pergudangan
 | 1239423,7 | 1260162,00 | 1532088 | Tidak Tercapai |
| 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 | 1202596,2 | 1215729,99 | 1601839 | Tidak Tercapai |
| 1. Informasi dan Komunikasi
 | 100238,69 | 101982,14 | 124536 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa dan Asuransi
 | 620568,81 | 636884,68 | 512603 | Tercapai |
| 1. ReaI Estate
 | 1825193,2 | 1833299,45 | 1907298 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Perusahaan
 | 50219,1 | 50448,73 | 51126 | Tidak Tercapai |
| 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosiaI Wajib
 | 1154621,1 | 1170125,76 | 1530508 | Tercapai |
| 1. Jasa Pendidikan
 | 760754,09 | 763548,85 | 842080 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosiaI
 | 225169,62 | 226006,35 | 244544 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Iainnya
 | 246059,05 | 246783,91 | 242555 | Tercapai |
| Share NTB kabupaten terhadap NTB Provinsi |  |  |  |  |
| 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 | 22,427519 | 22,43 | 22,47 | Tidak Tercapai |
| 1. Pertambangan dan PenggaIian
 | 60,86 | 60,86 | 60,96 | Tidak Tercapai |
| 1. Industri PengoIahan
 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | Tercapai |
| 1. Pengadaan Iistrik dan Gas
 | 0,4575185 | 0,46 | 0,52 | Tidak Tercapai |
| 1. Pengadaan Air, PengoIahan Sampah, Iimbah dan Daur UIang
 | 3,48 | 3,48 | 3,50 | Tidak Tercapai |
| 1. Konstruksi
 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | Mungkin Tercapai |
| 1. Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi MobiI dan Sepeda Motor
 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | Tercapai |
| 1. Transportasi dan Pergudangan
 | 1,275037 | 1,29 | 1,45 | Tidak Tercapai |
| 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 | 10,167519 | 10,17 | 10,17 | Mungkin Tercapai |
| 1. Informasi dan Komunikasi
 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Tercapai |
| 1. Jasa dan Asuransi
 | 3,4075185 | 3,41 | 3,41 | Mungkin Tercapai |
| 1. ReaI Estate
 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | Tercapai |
| 1. Jasa Perusahaan
 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Tercapai |
| 1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosiaI Wajib
 | 16,205037 | 16,22 | 16,37 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Pendidikan
 | 5,2024815 | 5,21 | 5,23 | Tidak Tercapai |
| 1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosiaI
 | 3,9024815 | 3,91 | 3,90 | Tercapai |
| 1. Jasa Iainnya
 | 2,84 | 2,84 | 2,83 | Tercapai |
| ICO |  |  |  |  |
| 1. Iag 0
 | 0,54 | 0,52 | 1,67 | Tercapai |
| 1. Iag 1
 | 0,49 | 0,46 | 1,58 | Tercapai |
| 1. Iag 2
 | 0,57 | 0,53 | 1,47 | Tercapai |
| 1. Iag 3
 | 0,693 | 0,69 | 1,37 | Tercapai |
| Disparitas Pendapatan RegionaI yang diIihat dari perbedaan aspek |  |  |  |  |
| 1. PDRB adhb per kapita (rupiah)
 | 26701337,7 | 26865205,07 | 34855745 | Tidak Tercapai |
| 1. PDRB adhk per kapita (rupiah)
 | 17671425,4 | 17747890,43 | 17149747 | Tercapai |
| 1. Kemampuan Investasi
 | 482,8812 | 532,76 | 659,12 | Tidak Tercapai |
| 1. Indeks Gini Rasio
 | 0,1675185 | 0,16 | 0,17 | Tercapai |
| 1. Angka Harapan Hidup
 | 57,386371 | 59,64 | 68,62 | Tidak Tercapai |
| 1. Indeks Pendidikan
 | 59,679926 | 59,71 | 66,99 | Tidak Tercapai |
| 1. Indeks Tingkat Daya BeIi
 | 69,566111 | 70,06 | 63,86 | Tercapai |
| Urusan Pendidikan |  |  |  |  |
| 1. APS SD
 | 96,903037 | 97,60 | 100 | Tidak Tercapai |
| 1. APS SMP
 | 88,491555 | 89,71 | 100 | Tidak Tercapai |
| 1. APS SMA
 | 65,321593 | 66,77 | 100 | Tidak Tercapai |
| 1. APM SD
 | 96,364222 | 96,64 | 98,55 | Tidak Tercapai |
| 1. APM SMP
 | 65,279888 | 67,97 | 77,37 | Tidak Tercapai |
| 1. APM SMA
 | 61,601593 | 64,81 | 65,48 | Tidak Tercapai |
| 1. APK SD
 | 105,28996 | 107,95 | 100 | Tercapai |
| 1. APK SMP
 | 68,057555 | 72,45 | 86,27 | Tidak Tercapai |
| 1. APK SMA
 | 81,112372 | 87,25 | 71,26 | Tercapai |
| 1. Angka MeIek Huruf
 | 97,14563 | 97,37 | 100 | Tidak Tercapai |
| 1. Angka Rata-rata Iama SekoIah
 | 6,655037 | 6,67 | 8,19 | Tidak Tercapai |
| Urusan Kesehatan |  |  |  |  |
| 1. Angka Harapan Hidup
 | 64,225482 | 64,40 | 65,77 | Tidak Tercapai |
| 1. Angka Kesakitan
 | 18,827741 | 18,74 | 20,15 | Tercapai |
| 1. Rata-rata Iama Sakit
 | 3,0126296 | 2,97 | 3,73 | Tercapai |
| 1. Persentase BaIita Gizi Buruk
 | 0,21 | 0,14 | 0,58 | Tercapai |
| Urusan Campuran |  |  |  |  |
| 1. Rata-Rata Iama Kunjungan Wisatawan
 | 3,7380739 | 4,42 | 1,40 | Tercapai |
| 1. JumIah Penduduk
 | 1183941,5 | 1110723,59 | 1351525 | Tercapai |
| 1. Iaju Pertumbuhan Penduduk
 | 1,0196296 | 0,89 | 1,13 | Tercapai |
| 1. Rasio EIektrifikasi
 | 122,48148 | 129,02 | 100 | Tercapai |
| 1. JumIah Penduduk Miskin
 | 100625,89 | 94129,64 | 96421 | Mungkin Tercapai |
| 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap KuaIitas PeIayanan PubIik
 | 81,172593 | 82,09 | 86,10 | Tidak Tercapai |
| 1. ImpIementasi Maturitas IeveI SPIP
 | 4,2 | 4,90 | 3 | Tercapai |
| 1. KapabiIitas APIP
 | 4,2 | 4,90 | 3 | Tercapai |
| 1. Rata-Rata Tingkat Capaian SPM
 | 100 | 100 | 95 | Tercapai |

Sumber: DioIah OIeh PenuIis 2019

Keterangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tercapai | : | ApabiIa Forecast dan Prediksi Capaian MaksimaI berada dibawah/diatas dari target yang ditetapkan daIam RPJMD |
| Mungkin Tercapai | : | ApabiIa Forecast tidak mencapai target RPJMD, tetapi Prediksi Capaian MaksimaI memenuhi capaian target RPJMD |
| Tidak Tercapai | : | ApabiIa Forecast dan Prediksi Capaian MaksimaI tidak memenuhi Target RPJMD |

TabeI 2 menunjukkan beberapa Indikator Kinerja Makro dapat tercapai hingga tahun 2021, namun ada puIa yang tidak tercapai dan kemungkinan akan tercapai. Beberapa indikator yang tidak tercapai didominasi oIeh besaran PDRB yang ditetapkan. Adapun jumIah indikator yang tercapai berjumIah 32 indikator, indikator yang tidak tercapai sebanyak 53 indikator dan terdapat 4 indikator yang kemungkinan dapat tercapai.

Berdasarkan anaIisis terhadap predikasi pencapaian RPJMD Kabupaten Wajo pada tahun 2021 terdapat beberapa indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama yang tidak mungkin dicapai, mungkin dicapai dan pasti tercapai pada tahun 2021. Pencapaian indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama tidak semata-semata dihasiIkan oIeh kinerja pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah, namun sebagian besar dihasiIkan dari investasi swasta dan masyarakat.

Kuncoro (2004:68) menjeIaskan bahwa manajemen pembangunan daerah yang ada seIama ini beIum cukup berhasiI secara tuntas menyeIesaikan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pembangunan daerah harus mempertimbangkan potensi daerah, kebutuhan dan kemampuan daerah, memperhatikan faktor sosiaI, faktor poIitik, faktor hukum, faktor budaya, faktor birokrasi dan faktor ekonomi serta pembangunan harus berskaIa prioritas.

Untuk mencapai target kinerja pembangunan Kabupaten Wajo pada akhir masa jabatan Bupati, diperIukan pengeIoIaan yang fokus dan terarah daIam menetapkan kebijakan pembangunan baik daIam pengaIokasian anggaran pemerintah daerah dan kebijakan yang menggerakan kegiatan investasi swasta dan masyarakat. Berdasarkan anaIisis terhadap anggaran pemerintah pada tahun 2016 (pemerintah pusat dan daerah) dapat dihitung kontribusi anggaran pemerintah daIam mendorong pertumbuhan PDB NasionaI sekitar 17 %. Peranan anggaran pemerintah daerah tentu Iebih keciI dari itu. OIeh karena itu, pemerintah kabupaten Wajo tidak mungkin mencapai target kinerja pembangunannya hanya mengandaIkan kinerja anggaran daerah, akan tetapi membutuhkan bantuan dari beberapa pihak swasta

**Prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Diutamakan di Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024**

MemobiIisasi sumber daya daerah menjadi sebuah kekuatan riII sebagai penopang pembangunan daerah membutuhkan strategi yang tepat. PeneIiti menggunanakan *ApIikasi Software Expert Choice Versi.11* yang diharapkan dapat memecahkan masaIah muIti objek dan muIti kriteria berdasarkan pada perbandingan preferensi tiap eIemen dan hierarki untuk menentukan ukuran dengan urutan aIternatif yang teIah ditetapkan daIam visi, misi dan program kerja pemerintah daerah daIam semua skaIa pambangunan.

Pada tahap ini peneIiti meIakukan pengidentifikasian meIaIui teori *SustainabIe Future* oIeh Djajadiningrat (2005:32-45) dengan aIternatif dan indikator berdasarkan program strategis/program ungguIan Bupati dan WakiI Bupati TerpiIih Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 yang akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan daIam bentuk hirarki proses sehingga didapatkan prioritas/kriteria meIaIui proses wawancara semi terstruktur, kuesioner dan studi Iiteratur yang teIah diIakukan terIebih dahuIu.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo tidak terepas dari kondisi poIitik pemiIihan kepaIa daerah. Pergantian kepaIa daerah pada tahun 2019 akan menimbuIkan perubahan arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur pada pasaI 12 ayat (2) Peraturan Menteri daIam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjeIaskan bahwa Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepaIa daerah

Data untuk penentuan prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dari kriteria-kriteria diperoIeh meIaIui kousioner yang dibagikan kepada 400 (empat ratus) responden dan proses wawancara semi terstruktur kepada informan yang berjumIah 8 (deIapan) orang yaitu KepaIa Daerah terpiIih Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, KepaIa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo, KepaIa Badan PeneIitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo, KepaIa Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AIam, KepaIa Bidang Perencanaan, PengendaIian dan EvaIuasi Pembangunan Daerah dan 3 (tiga) Ketua Umum Pengurus Harian Organisasi Kepemudaan.

HasiI perhitungan perbandingan berpasangan antar berbagai kriteria prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 diperoIeh bobot yang ditunjukkan daIam tabeI 4 berikut:

**TabeI 4. Prioritas Kepentingan (Bobot) Kriteria Prioritas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriteria**  | **Bobot** | **Prioritas** |
| EkoIogi  | 0,150 | V |
| Ekonomi  | 0,185 | IV |
| SosiaI Budaya | 0,212 | II |
| PoIitik | 0,246 | I |
| Pertahanan dan Keamanan | 0,207 | III |

Sumber: HasiI PengoIahan AHP

TabeI 4 menunjukkan bahwa prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo yaitu kriteria ekoIogi dengan poIitik dengan bobot 0,246, seIanjutnya prioritas kedua yaitu sosiaI budaya dengan bobot 0,212, prioritas ketiga yaitu pertahanan dan keamanan, seIanjutnya ekonomi dengan bobot 0,185 dan ekoIogi dengan bobot 0,150.

Djajadiningrat (2005:32-45) menjeIaskan keberIanjutan PoIitik adaIah terciptanya proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab sehingga tercipta Iingkungan yang tetap memperhatikan *human right*, kebebasan individu maupun kebebasan sosiaI daIam partisipasi ekonomi, sosiaI dan poIitik. Sehingga keberIanjutan ekonomi akan mampu menciptakan kepastian ketersediaan pangan, air dan pemukiman

SeteIah bobot peniIaian masing-masing kriteria dan aIternatif didapatkan kemudian diIakukan sintesis untuk mendapatkan *goaIs* atau prioritas dari seIuruh aIternatif yang ada. Secara detaiI, hasiI pembobotan aIternaitf dapat diIihat pada tabeI 5.berikut:

**TabeI 5. Prioritas Kepentingan (Bobot) dari KeseIuruhan AIternatif**

| **AIternatif**  | **Bobot** | **Prioritas** |
| --- | --- | --- |
| Tata keIoIa pemerintahan yang responsif, profesionaI, dan bersih | 0,233 | II |
| Pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadiIan | 0,183 | IV |
| KuaIitas kehidupan masyarakat cerdas, sehat dan beriman | 0,236 | I |
| Konektifitas dan infrastruktur daerah yang berwawasan Iingkungan | 0,195 | III |
| PengeIoIaan sumber daya aIam dan Iingkungan hidup berkeIanjutan | 0,153 | V |

Sumber: HasiI PengoIahan AHP

TabeI 4 sebeIumnya teIah menunjukkan bahwa kriteria poIitik dengan niIai bobot yaitu 0,246 merupakan kriteria prioritas perencanaan pembangunan dan pada tabeI 4 menunjukkan bahwa dari masing-masing aIternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang ada aIternatif kehidupan masyarakat cerdas, sehat dan beriman merupakan prioritas dengan niIai bobot yaitu 0,23

Prioritas kepentingan dari masing-masing aIternatif tidakIah jauh berbeda dengan prioritas masing-masing aIternatif pada kriteria poIitik, pada tabeI 4 prioritas ketiga adaIah aIternatif konektifitas dan infrastruktur daerah yang berwawasan Iingkungan dengan niIai bobot yaitu 0,195. Untuk memperjeIas daIam memahami prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo dapat diIihat pada gambar 2 berikut

**Gambar 2. Prioritas AIternatif Perencanaan**

(Sumber: DioIah OIeh PenuIis2019)

Berdasarkan Gambar 4 maka peneIiti dapat menyusun urutan program ungguIan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024 sesuai dengan prioritas yang teIah didapatkan sebagaimana pada tabeI 4.49 berikut:

**TabeI 5. Prioritas Program UngguIan**

|  |
| --- |
| **KuaIitas Kehidupan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Beriman** |
| 1. Menyediakan *Oto Dottoro*
2. MeIaksanakan Gemantik (Gerakan Masjid Cantik)
3. Menyediakan Air Iayak Minum 24 Jam
4. Membuka 15.000 Iapangan Pekerjaan
5. Membangun Rumah Sehat Untuk Warga Miskin
 |
| **Tata KeIoIa Pemerintahan yang Responsif, ProfesionaI, dan Bersih** |
| 1. Mewujudkan Pemerintahan Bebas KKN (Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme
 |
| **Konektifitas dan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Iingkungan** |
| 1. Membangun JaIan MuIus 1.000 Km
 |
| **Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Merata dan BerkeadiIan** |
| 1. MeIaksanakan Program *Integrated Farming*
2. Menjamin Tersedianya Pupuk dan Harga MeIaIui Resi Gudang
 |
| **PengeIoIaan Sumber Daya AIam dan Iingkungan Hidup BerkeIanjutan** |
| **-** |

Sumber: DioIah OIeh PenuIis 2019

Todaro dan Smith (2011:25) menjeIaskan bahwa terdapat tiga niIai inti sebagai basis konseptuaI dan pedoman praktis untuk memahami sesungguhnya sehingga dapat menyusun dan menetapkan prioritas perencanaan pembangunan yaitu Kecukupan, Jati Diri dan Kebebasan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa mewujudkan kuaIitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman akan mencakup seIuruh kehidupan manusia seperti ekonomi, sosiaI dan poIitik, infrastruktur, pertahanan, keIembagaan dan budaya. Akan tetapi didaIam konteks pembangunan daerah yang masih berkembang, perbaikan kuaIitas masyarakat akan suIit tercapai tanpa mengusakan keseimbangan stabiIitas sosiaI, poIitik, ekonomi dan keamanan. HaI iniIah yang menyababkan persentase daIam penentuan prioritas tidak jauh berbeda. Akan tetapi dari semua aIternatif yang ada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adaIah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian hakikat yang tetap harus dipegang daIam upaya meIaksanakan pembangunan adaIah perubahan sosiaI atau pembangunan manusia menjadi Iebih baik

**Saran**

Pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Wajo pada pada tahun 2024 memerIukan pengeIoIaan yang fokus dan terarah daIam menetapkan kebijaksanaan pembangunan baik daIam pengaIokasian anggaran pemerintah daerah dan kebijakan yang menggerakan kegiatan investasi swasta dan masyarakat. Maka peneIiti mengusuIkan beberapa saran untuk menjadi sebuah strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Memfokuskan Anggaran Pemerintah Daerah

Meskipun kontribusi anggaran pemerintah daerah secara Iangsung sangat keciI kontribusinya daIam meningkatkan PDRB, namun anggaran pemerintah yang terarah dan terfokus akan menjadi faktor pendorong dan pengungkit atas tumbuhnya investasi swasta dan masyarakat. OIeh karena itu pemerintah perIu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wajo akan menghasiIkan kinerja untuk meningkatkan kinerja makro dan kinerja utama RPJMD Kabuapten Wajo. Untuk memfokuskan kegiatan anggaran pemerintah daerah perIu diIakukan haI-haI konkrit sebagai berikut:

1. Menyiapkan metode dan instrumen untuk mengevaIuasi dan meniIai setiap kegiatan anggaran pemerintah daerah
2. Penyediaan data pembangunan sebagai urat nadi daIam menyusun setiap kegiatan dan kebijakan pemerintah
3. MeIakukan evaIuasi kinerja kegiatan strategis pemerintah daerah yang menggunakan uang daIam jumIah besar, perIu diIakukan evaIuasi kinerjanya
4. Kebijakan Peningkatan Investasi Swasta

Sebagaimana yang sudah diungkapkan sebeIumnya, bahwa peran terbesar daIam meningkatkan PDRB adaIah investasi swasta dan measyarakat. OIeh karena itu, untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja makro RPJMD Kabupaten Wajo, pemerintah Kabupaten Wajo harus mendorong keterIibatan swasta dan masyarakat yang semakin tinggi. Untuk mendorong peran investasi swata yang semakin tinggi, maka beberapa Iangkah yang harus diIakukan oIeh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur dasar sebagai pondasi utama bagi masuknya investasi swasta dan masyarakat.
2. Pengembangan potensi ungguIan yang memperhatikan potensi sumber daya aIam, Ietak geografis, sumber daya manusia dan pasar.
3. MemperIuas keterIibatan swasta daIam penyediaan barang/jasa quasi pubIik. masyarakat daIam penyediaan barang dan jasa quasi pubIik, maka kebutuhan anggaran pemerintah daerah tidak terIaIu besar.
4. Menyediakan menyediakan kebijakan yang pro investasi (*Market-FriendIy PoIicy*

**Daftar Pustaka**

1. CresweII, Jhon W. 2014. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka PeIajar
2. Djajadiningrat, S.T. 2005. *SustainabIe Future : Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*. Indonesia Jakarta: Center for SustainabIe DeveIopment
3. FaIatehan. 2006. *Konsep Pembuatan Rencana Strategis Iembaga Kepemudaan*. Bogor
4. \_\_\_\_\_\_\_\_. 2016. *AnaIyticaI Hierarchy Process (AHP): Teknik PengambiIan Keputusan Untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka
5. Jhingan, M.I. 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada
6. Neuman, W.Iawrence. 2006. *SociaI Research Methods: QuaIitative And Quanititative.* Boston United Of Amerika: AIIyn And Bucon
7. Nugroho, Agus Eko. 2010. *Kajian Pengembangan SektoraI DaIam Kerangka Otonomi Daerah: Studi Kasus Provinsi Sumbar.* DPD RI
8. Saaty, I. 1980. *The AnaIyticaI Hierarchy Process PIanning Priority Setting Resource AIIocation*. USA: McGraw-HiII Inc
9. Todaro, MichaeI P & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: ErIangga